



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 285 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR DAN PENUNJUKAN ADMINISTRATOR
PADA UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk Koordinator dan menunjuk Administrator yang mengelola Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Administrator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan.

ДИАМАТ НЕДА ГЛАСУС БАРЫНГАН
БАДАЛЫКТАРЫН
СОСЫЗ КИНАТ

ДИАМЫТ

ДИАМЫТ НЕДА ГЛАСУС БАРЫНГАН
БАДАЛЫКТАРЫН
СОСЫЗ КИНАТ

ДИАМАТ НЕДА ГЛАСУС

ДИАМАТ НЕДА ГЛАСУС БАРЫНГАН
БАДАЛЫКТАРЫН
СОСЫЗ КИНАТ

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinator dan Menunjuk Administrator pada Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

[Signature] KEDUA ...
[Signature] *[Signature]*

8. Peristrukturasi Pemerintahan Motor di Tahun 2008 termasuk Sistem Pengendali dan Pemerintahan
9. Peristrukturasi Pemerintahan Motor di Tahun 2012 termasuk
Minselanjutnya Lembaga Negara Sipil
10. Peristrukturasi Pemerintahan Motor di Tahun 2010 termasuk
Pengelolaan Konsolidasi Daerah
11. Peristrukturasi Pemerintahan Motor di Tahun 2011 termasuk
Disiplin Pegawai Negara Sipil
12. Peristrukturasi Pemerintahan Motor di Tahun 2013 termasuk Sistem
Masihi Perdagangan dan Perpertaminaan Konsolidasi Sistem
Bantuan Tahun 2013-2025 dari Tantang Menteri Kabinet Tahun
2013-2014;
13. Peristrukturasi Pemerintahan Motor di Tahun 2014 termasuk Pengaturan
Rumah Sakit Binaan Motor di Tahun 2014 termasuk Pengaturan
Pembangunan Sosial Infrastruktur Masyarakat Wilayah Bantuan di
Kota-kota dan Wilayah Binaan Berisikan dan Melaksanai di
Pungkiran Konsolidasi Pemimpinan Pemerintahan
14. Peristrukturasi Menteri Dalam Negeri Motor di Tahun 2015
berdasarkan Perdamaian Teknis Pengelolaan Konsolidasi Daerah
15. Gairah Kapabila Accp Tamisasi
sentralisasi Pemerintahan di Sumatera Selatan Pemerintahan
Kapabila Accp Tamisasi
16. Peristrukturasi Bapak Accp Tamisasi Motor di Tahun 2011
berdasarkan Perbaikan Pelayanan Publiknasional Sistem Penerbangan
Internasional Pemerintahan di Pimpinan Pemerintahan Kapabila
Accp Tamisasi
17. Peristrukturasi Bapak Accp Tamisasi Motor di Tahun 2010
berdasarkan Perbaikan Sistem Otonomi Tingkat Tingkat
Tata Kelola Bantuan Kependidikan dan Pengembangan Sumber
Daya Minyak Kapabila Accp Tamisasi
18. Peristrukturasi Bapak Accp Tamisasi Motor di Tahun 2014
berdasarkan Keterintegritas Pemerintahan Hasta Kepresidenan Pemerintahan
Moderasi di Lingkungan Pemerintahan Kapabila Accp Tamisasi

MEMUTUSKAN :

KESATA : Mengakuinya Tuan Koordinator dan Menteri Amanat dalam dasar
Untuk Pemerintahan Nasional Hasta Kepresidenan Pemerintahan Waktu di
Pimpinan Pemerintahan Kepresidenan Accp Tamisasi Tahun 2023
dengan susunan kesatuan sebagaimana ketentuan dasar
pemerintahan Kesatuan

- KEDUA : Tim Koordinator dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Koordinator LHKPN Kabupaten mempunyai tugas;
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e- LHKPN;
 2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lama tanggal 15 Desember setiap tahun;
 3. melakukan pemutakhiran data kedalam aplikasi e-LHKPN;
 4. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 5. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati;
 6. menyediakan media pengumuman harta kekayaan dengan mengaitkan tautan pengumuman *Anti Corruption Clearing House* KPK ke laman situs Pemerintah Kabupaten.
 - b. Administrator LHKPN Kabupaten bertugas:
 1. membuat "account" beserta "password" seluruh Administrator SKPK di lingkungan unit kerja masing-masing dan melakukan pemeliharaan "account" tersebut termasuk penghapusan data Administrator dan pembaharuan data (*update*);
 2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN apabila akan dilakukan penghapusan data (*delete data*) Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN;
 3. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja para Administrator SKPK dan menyampaikan laporan hasil pembaharuan data (*update*) dan penghapusan data (*delete data*) kepada Unit Pengelola LHKPN.
 - c. Administrator LHKPN SKPK bertugas:
 - a. melakukan pemasukan data (*entry data*) pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. melakukan perubahan data (*edit data*) pejabat di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - c. melaporkan kepada Administrator Kabupaten dalam hal penghapusan data (*delete data*) guna selanjutnya untuk dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.

[Handwritten signatures]
KELIMA...
[Handwritten signature]

KEDUA : Jika Koordinator dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktiinstitusi KESATA berlaku :

1. Perkoordinasi tetapnya kepada LHKPN dulu sebelumnya dilakukan oleh Komunitas Kependidikan
2. menyampaikan dirinya kepada wakil dari pihak pengelola Wajib LHKPN ketika HKI belum dapat diidentifikasi
3. mengizinkan pemerintahan atas kesatuan dipilih oleh LHKPN
4. mengizinkan Wajib LHKPN untuk komunitasnya beranggur bersama-sama LHKPN
5. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
6. memberi hak untuk mendukungnya pada kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan
7. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
8. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
9. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
10. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
11. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
12. Desember setiap tahun;
13. menyampaikan dirinya kepada wakil dari pihak pengelola Wajib LHKPN ketika HKI belum dapat diidentifikasi
14. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN
15. mengangkatnya sebagai anggota LHKPN

KETIGA : Dapat memberikan informasi Tim pertandingan kepada
Babat Aceh yang merupakan Sekretaris Dosen.

KIGEMPA : Segala pihak dan timbul akibat diketahui bahwa tidak ada
dihimpun bersama Anabaptis Pendekatan Efeknya kepada
Acara Tatting Tafsir Viaggio 2023 berdasarkan Pada
Kebutuhan Politik dan Sosial Dalam Masyarakat Republik
Acap Tuntutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Bappeda Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektor Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

KELIMA : Kedutuan ini wajib peroleh basas tundas dilantiknya ketua
ketentuan sebagaimana terdapat dalam ketua Kedutuan ini
akan diambil berdasarkan sebagaimana mestinya.

Dilepas dari Keranjang Basar
basas rambatan
5035 W
1449 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURAI

- Seluruh Kedutuan ini disusun keadaan :
1. Menteri Dalam Negara Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Pendayagunaan Aset dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Komisi Perempuan Nasional di Jakarta;
 4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
 5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Keranjang Basar;
 6. Ketua Bapdes Aceh Tamiang di Keranjang Basar;
 7. Ketua BKD Aceh Tamiang di Keranjang Basar;
 8. Jatahakku Kapituler Aceh Tamiang di Keranjang Basar.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 385 TAHUN 2022
TANGGAL: 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR DAN ADMINISTRATOR PADA
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
5.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Sekretaris BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
11.	Analis Kebijakan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Renny Khairuna Sari, ST, MAP)	Administrator	
12.	Analis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Tengku Rief Hamdani, SE)	Administrator	
13.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Ghustiva Liani, S.S, M.A)	Tenaga Teknis	
14.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Budiman)	Tenaga Teknis	
15.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Yusrizal)	Tenaga Teknis	
16.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Lila Irnalita, SP)	Tenaga Administrasi	

[Handwritten signatures/initials over the bottom right corner of the table]

Pembuat : KEPURTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 Nomor : 007
 Tanggal : 2023 M
 HES H

BUKUAN KEGIATAN TIM KORDINATOR DAN ADMINISTRATOR PADA
 UNIT KEGIATAN LAYARAN HARTA KERAYAAN PEMERINTAHAN NEGERIA
 DI TINGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2023

KETERANGAN	KEGIATAN DALAM	TAWATAN POKOK NAMA	No
	Budaya	1. Bupati Aceh Tamiang	
	Pengaruh	2. Wakil Bupati Aceh Tamiang	
	Ketua	3. Sekretaris Dinas	
	Wakil Ketua	4. Asisten Administrasi Umum	
	Seputera	5. Kepala BKPSDM Kap. Aceh	
	Wakil Sekretaris	6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan basa BKPSDM	
	Anasor	7. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan	
	Anasor	8. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan	
	Administrator	9. Kepala Dinas Kesehatan	
	Administrator	10. Kepala Dinas Pendidikan	
	Administrator	11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Administrator	12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	Administrator	13. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Administrator	15. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial	
	Administrator	16. Kepala Dinas Pariwisata	
	Administrator	17. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	18. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	19. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	20. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	21. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	22. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	23. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	24. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	25. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	26. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	27. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	28. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	29. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	30. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	31. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	32. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	33. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	34. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	35. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	36. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	37. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	38. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	39. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	40. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	41. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	42. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	43. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	44. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	45. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	46. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	47. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	48. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	49. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	50. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	51. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	52. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	53. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	54. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	55. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	56. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	57. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	58. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	59. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	60. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	61. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	62. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	63. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	64. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	65. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	66. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	67. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	68. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	69. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	70. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	71. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	72. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	73. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	74. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	75. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	76. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	77. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	78. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	79. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	80. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	81. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	82. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	83. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	84. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	85. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	86. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	87. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	88. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	89. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	90. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	91. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	92. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	93. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	94. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	95. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	96. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	97. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	98. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	99. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	
	Administrator	100. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat	

17.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Willi Wilanda, ST)	Tenaga Administrasi	
18.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Rita Dewi Handayani, SE)	Tenaga Administrasi	
19.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Kesumawati)	Tenaga Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mursil
MURSIL